



Rencana Aksi Tahun 2022

**DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami pajatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 dapat tersusun.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2022 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten . Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2022.

Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode 2017- 2022 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022.

Kepala Dinas



M. Reclimat Rogianto, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari KKN.

Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Provinsi Banten meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten :

- Pasal 52 :
 - Ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ayat (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.;
- Pasal 157 :
 - ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

Fungsi

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- b) Melaksanakan Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
- c) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
- d) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
- e) Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f) Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g) Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- h) Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- i) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- j) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- k) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- l) Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- m) Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- n) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
 - 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Jabatan Fungsional.

B. Sumberdaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dalam bidang kompetensi/ kualitas SDM.

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia

PEGAWAI	PENDIDIKAN	GOLONGAN	STRUKTURAL
1	2	3	4
PNS : 64	S3 : -	IV/d : 1	Ess IV = 11
PTHL : 2	S2 : 28	IV/b : 4	Ess III = 4
	S1 : 25	IV/a : 5	Ess II = 1
	D4 : 0	III/d : 9	
	D3 : 6	III/c : 27	Staf = 48
	D2 : 0	III/b : 8	
	D1 : 0	III/a : 5	
	SLTA : 5	II/d : 2	
	SLTP : -	II/b : 4	

C. Sarana Pendukung

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN*
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Alat-alat angkutan				Lengkap
2.	Alat kantor dan rumah tangga				Lengkap
3.	Alat studio dan alat komunikasi				Lengkap
4.	Bangunan gedung				Lengkap
5.	Bangunan air/ Irigasi				Lengkap
6.	Instalasi				Lengkap
7.	Buku dan perpustakaan				Lengkap

D. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah :

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD;
2. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani;
3. Persentase Rumah layak Huni;
4. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah;
5. Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	A
2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	375,29 Ha
3		Persentase Rumah LayakHuni	88,66%
4		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20.00%
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100.00%

BAB III

RENCANA AKSI TAHUN 2022

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021.

Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022. Visi tersebut yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2021, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
2. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
3. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
4. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan

5. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

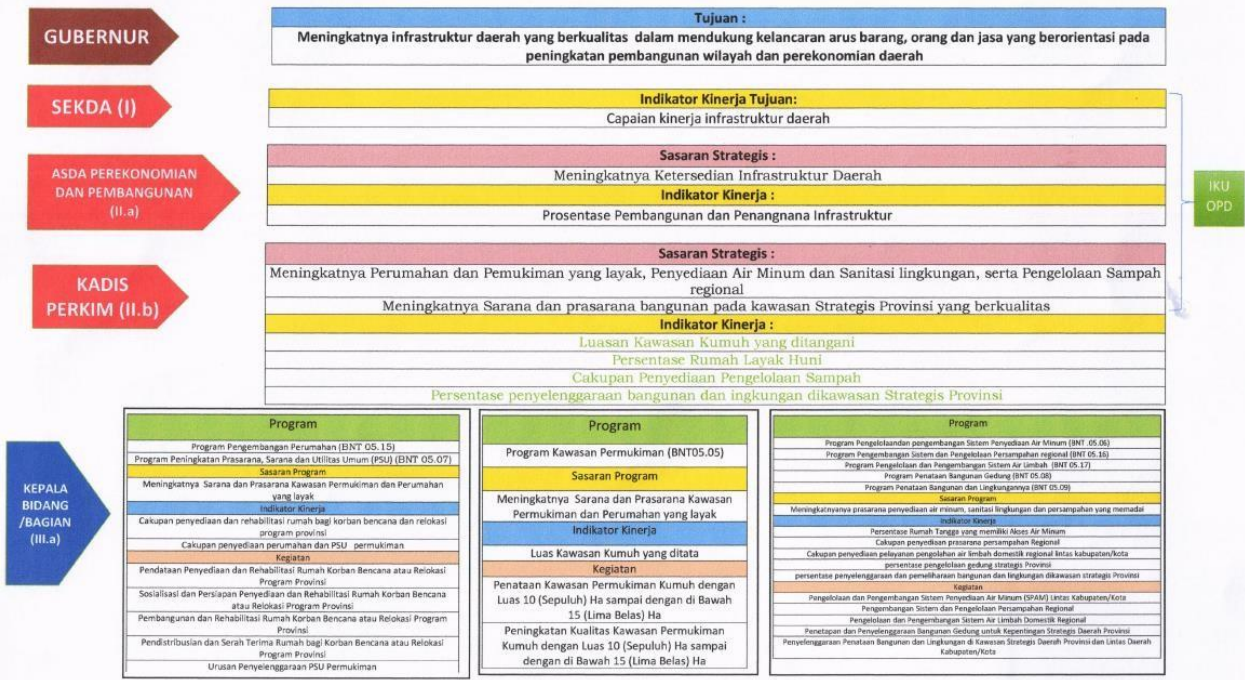
Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua.
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu pada Visi Misi dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”** dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah” Tujuan utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang hendak dicapai periode 2017- 2022 adalah “Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah”

CASCADING KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Program Pengembangan Perumahan

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Unit Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan TimSatgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Data Rumah KorbanBencana Kejadian Sebelumnya yang belumTertangani	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Luas Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		
Indikator Sub Kegiatan :		
Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		
Sub Kegiatan		
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		
Indikator Sub Kegiatan :		
Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi PenerimaRumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		
Sub Kegiatan		
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		
Indikator Sub Kegiatan :		
Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa MilikMasyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
Sub Kegiatan	
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
Indikator Sub Kegiatan :	
Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
Sub Kegiatan	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	
Indikator Sub Kegiatan :	
Jumlah Unit Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	
Sub Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
Indikator Sub Kegiatan :	
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Permukiman	

Program Kawasan Permukiman		
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh denganLuas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Hektaraan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

	Sub Kegiatan	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Jumlah Jiwa Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	
	Sub Kegiatan	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Jumlah Kegiatan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	Sub Kegiatan	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kawasan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	
Jumlah Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Lt/det Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	
Jumlah Kegiatan pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
	Indikator Sub Kegiatan :	
	Kegiatan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan hasil pembahasan **review terhadap Cascading Indikator kinerja Utama**, terjadi perubahan indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			2018	2019	2020	2021	2022
			SASARAN/PROGR AM	SASARAN/PROG RAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/POGRAM	Target				
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance)	Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5
			Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	B	BB	BB	A	A
					Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A
					Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	A
			Program Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.80	3.00	-	-	-
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	-	-	100.00	100.00	100.00
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	-	-	100.00	100.00	100.00

					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	100.00	100.00	100.00
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	100.00	100.00	100.00
2	Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis,kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Ha)	114.60	203.20	274.60	333.33	375.29
					Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	84.02	85.18	86.34	87.50	88.66
					Cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: %)			20.00	15.00	100.00
			Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiamn dan Perumahan	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	114.60	203.20	274.60	333.33	375.29
				Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi (Satuan : %)	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	84.02	85.18			85.18
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (satuan : %)			33.33	33.33	100.00
			Program Keciptakaryaan		Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (satuan : %)	72.75	76.15			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %)			81.24	88.04	96.53
					Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (satuan : %)	72.86	75.57			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (satuan : %)			5.00	15.00	100.00
					Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (satuan : %)	0.00	0.00			
				Program Pengembangan Sistem dan Pngelolaan Persampahan Regional	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (satuan : %)			20.00	20.00	20.00
			Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas	Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	40.00	50.00			
					Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)			75.00	88.00	100.00
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	28.00	69.00	83.00	89.00	100.00
				Program Penataan Bangunan daan Lingkungannya	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	25.00	50.00	75.00	88.00	100.00

C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar **Rp. 916.040.161.000, 00** (Sembilan Ratus Delapan Belas Milyar Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) Dengan rincian :

Tabel 1.42
Rencana Belanja menurut jenis belanja

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	72.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	72.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	400.957.264.339,00
5.1.01	Belanja Pegawai	13.773.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.586.553.141,00
5.1.03	Belanja Hibah	24.164.942.454,00
5.2	BELANJA MODAL	384.515.665.405,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.136.547.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.774.086.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.645.031.605,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.710.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	916.040.161.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(916.040.161.000,00)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melaksanakan Program, 20 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Senilai Rp. 28.480.161.000,00 Program Pengembangan Perumahan Senilai Rp. 13.400.000.000,00, Program Kawasan Permukiman Senilai Rp. 56.965.000.000,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Senilai Rp. 345.250.000.000,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Senilai Rp. 11.500.000.000,00, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Senilai Rp 300.000.000,00, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Senilai Rp. 1.920.000.000,00, Program Penataan Bangunan Gedung Senilai Rp. 362.541.358.605,00, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Senilai Rp. 9.140.220.800,00.

Rincian Program , kegiatan dan subkegiatan diantaranya :

Tabel 2.5

Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja Dalam Perjanjian KinerjaTahun 2021

NO.			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85%
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	104 Dokumen
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20 Dokumen
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen
		15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
		16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen
	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Dokumen
		17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57 Stel
		18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Dokumen
		19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen
		20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Dokumen
		21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Dokumen

		22	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen
	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dokumen
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	12 Bulan
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun Anggaran
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Anggaran
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan
		28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Kegiatan
		29	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun Anggaran
		30	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun Anggaran
		31	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	8 Paket
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Unit
		35	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit
		36	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen
		37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353 Unit
		38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit
		39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48 Unit
		40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288 Unit
		41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung
		42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung
2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	100%
	9		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	17 Dokumen
		43	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Jumlah Data Rumah KorbanBencana Kejadian Sebelumnya yang belumTertangani	2 Dokumen
		44	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	3 Dokumen
		45	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi PenerimaRumah bagi Korban Bencana Alam atau TerkenaRelokasi Program Provinsi	3 Dokumen

		46	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen
		47	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen
		48	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	3 Dokumen
	10		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
		49	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 Dokumen
	11		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	131 Unit
		51	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Unit Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	39 Unit
		52	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Tersedianya Unit Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	92 Unit
		53	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dokumen Kajian Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3 Dokumen
	12		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
		54	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	375.29 Ha
	13		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4 Kegiatan
		55	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	1 Kegiatan
		56	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Kegiatan
		57	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Terlaksananya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Kegiatan
		58	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kegiatan
	14		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	90,56 Ha
		59	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	188 Unit
		60	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	90,50 Ha
		61	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Rencana Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Dokumen

		62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali PermukimanKumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untukPencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19 Dokumen
4			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	33,33%
	15		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1613 Unit
		63	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Permukiman untuk MenunjangFungsi Permukiman	1613 Unit
		64	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Permukiman	258 Dokumen
		65	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSUPermukiman	12 Dokumen
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	96,53%
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	400 ltr/det
	16	66	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	400 ltr/det
		67	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen
		68	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		69	Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1 Dokumen
6			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20%
	17		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0 Jiwa
		70	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
7			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%
	18		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1 Unit
		72	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Dokumen
		73	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1 Unit
8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	100%
	19		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	20 Gedung

		74	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	12 Gedung
				Jumlah Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	10 Dokumen
				Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.309 M2
				Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	6 Dokumen
		75	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8 Gedung
9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100%
	20		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Kawasan
		76	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen
				Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3516 M2
		77	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	10 Dokumen
		78	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	6 Kawasan
		79	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Kawasan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Semoga Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LAMPIRAN

***MATRIK RENCANA AKSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN 2022***

RENCANA AKSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	TARGET OUTPUT BULANAN											
		Capaian Program	Kegiatan/Sub Kegiatan					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				388.200.000.000														
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			Terlaksananya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	388.200.000.000	Gedung	8												
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	100 %	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanaann	375.000.000.000	Gedung	8												
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.200.000.000	Kegiatan	1												
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				51.700.000.000														
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	51.700.000.000	Kawasan	5												
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100 %	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.200.000.000	Kegiatan	1												
	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2.300.000.000	Kawasan	5												
	Penataan Bangunan dan Lingkungan			Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	27.200.000.000	Kawasan	5												
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	12.000.000.000	Kegiatan	3												

KEPALA DINAS,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT

NIP. 19710720/200212 1 004